

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Lokasi Penelitian

a. Kabupaten Wonosobo

Secara astronomis Kabupaten Wonosobo terletak diantara $7^{\circ}04'11''$ - $7^{\circ}11'13''$ LS dan $109^{\circ}43'10''$ - $110^{\circ}04'40''$ BT. Secara geografis Kabupaten Wonosobo terletak di tengah-tengah pulau jawa. Dan secara administratif Kabupaten Wonosobo masuk kedalam wilayah Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Wonosobo berbatasan langsung dengan Kabupaten Kendal dan Batang di sisi utara, Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Temanggung pada sisi selatan, sedangkan pada sisi barat berbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Kebumen serta pada sisi timur berbatasan dengan Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Magelang.

Kabupaten Wonosobo merupakan daerah pegunungan dengan ketinggian lokasi antara 250 m hingga 2.250 m diatas permukaan laut. Pegunungan ini termasuk dalam jenis pegunungan muda dengan lembah yang curam. Luas wilayah kabupaten wonosobo adalah 98.468 ha terdiri dari 18.549 ha lahan sawah dan 79.919 ha bukan lahan sawah. Secara administratif daerah wonosobo terbagi dalam 4 wilayah pembantu bupati, 14 kecamatan, 236 desa dan 28 kelurahan.

Letak Wonosobo yang strategis dengan sebagian besar daerahnya adalah pegunungan menjadi beberapa sungai, seperti Sungai Serayu, Sungai Bogowonto, Kali Putih, Kali Semagung dan Luk Ulo. Sungai serayu yang menambah debit air di Telaga Menjer telah dimanfaatkan airnya untuk membangkitkan listrik tenaga air. Tidak kalah penting daerah ini juga memiliki banyak potensi wisata seperti Dataran Tinggi Dieng (*Dieng Plateau*) dengan panas buminya yang telah dimanfaatkan sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), kawah dan panorama yang indah lainnya. Selain itu terdapat juga candi-candi peninggalan Kerajaan Mataram Hindu dan beberapa situs sejarah lainnya. Semuanya itu adalah sebagai daya tarik utama bagi wisatawan manca negara maupun wisatawan nusantara untuk berkunjung ke Wonosobo.

Selain itu, Kabupaten Wonosobo identik dengan kawasan hutan. Hutan Wonosobo dibedakan menjadi dua yaitu hutan rakyat dan hutan negara. Hutan rakyat adalah hutan yang secara swasembada dimiliki dan dikelola oleh rakyat. Sedangkan hutan Negara adalah yang dimiliki dan dikelola oleh Negara atau pemerintahan. Fungsi hutan di kabupaten wonosobo adalah Sebagai upaya konservasi tanah, Menjaga keanekaragaman hayati, Mencegah erosi, longsor dan banjir, Daerah peresan air atau penyimpan air, Mengurangi pemanasan global, Menambah pendapatan masyarakat sekitar hutan dan Sebagai sumber devisa.

b. Kawasan Dataran Tinggi Dieng

Kawasan Dataran Tinggi Dieng adalah kawasan yang mempunyai ketinggian berkisar ± 1500 m keatas dari permukaan air laut, merupakan kawasan yang memiliki keterkaitan biogeofisik, sosial, ekonomi dan budaya, yang terletak di sebagian wilayah Kabupaten Banjarnegara, Wonosobo, Temanggung, Kendal, Batang dan Pekalongan, Jawa Tengah. Kawasan Dieng yang termasuk wilayah Kabupaten Pekalongan seluas 18,786.04 Ha, Kabupaten Temanggung 5000 Ha, Kabupaten Batang 5000 Ha, dan Kabupaten Kendal 1,541.34 Ha. Sedangkan sebagian besar lainnya masuk ke dalam Kabupaten Banjarnegara dengan luas 11,795.34 Ha dan Kabupaten Wonosobo dengan luas 11,647.98 Ha (<http://www.scribd.com/doc/191012290/dieng>).

Kawasan Dataran Tinggi Dieng merupakan daerah ekologi penting untuk daerah sekitarnya. Hal ini dikarenakan Kawasan Dieng merupakan daerah hulu aliran sungai yang menjadi sumber air bagi masyarakat sekitarnya. Kawasan ini dialiri 8 daerah aliran sungai (DAS), yaitu hulu DAS Serayu, hulu DAS Progo, hulu DAS Bodri Ds, hulu DAS Lampir Ds, hulu DAS Sengkarang Ds, hulu DAS Comal, dan hulu DAS Sragi. DAS Serayu merupakan daerah tangkapan air (DTA) waduk Sudirman yang merupakan investasi besar guna irigasi dan tenaga listrik.

Di dalam Kawasan Dieng terdapat kawasan konservasi 53,4 ha, Hutan Produksi Terbatas 26.170,08 ha, Hutan Produksi 489,89 ha, Hutan Lindung 7506,34 ha, dan Areal Penggunaan Lain 20.754,56 ha.

c. Latar Belakang Berdirinya TKPD

Latarbelakang berdirinya TKPD yaitu karena adanya kerusakan lingkungan di Kawasan Dataran Tinggi Dieng. Diawali dengan adanya PPD, dimana ide PPD yaitu membangun sistem tata kelola DAS terintegrasi secara kolaboratif dalam rangka mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Untuk mengkoordinasikan upaya-upaya yang dilakukan dalam PPD, maka dibentuklah TKPD.

SK Bupati Wonosobo Nomor 180/25/2007 pada tanggal 25 Januari 2007, merupakan awal pembentukan TKPD. Hal ini dikarenakan Kawasan Dataran Tinggi Dieng sebagai kawasan lindung yang memiliki fungsi utama sebagai kawasan konservasi telah mengalami degradasi lingkungan yang cukup parah, sehingga membutuhkan penanganan dan pemulihan. TKPD dalam hal ini dimaksudkan untuk mempercepat dan mengefektifkan upaya pemulihan Kawasan Dataran Tinggi Dieng.

d. Profil TKPD

TKPD dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Wonosobo Nomor 180/25/2007 Tentang Pembentukan Tim Kerja Pemulihan

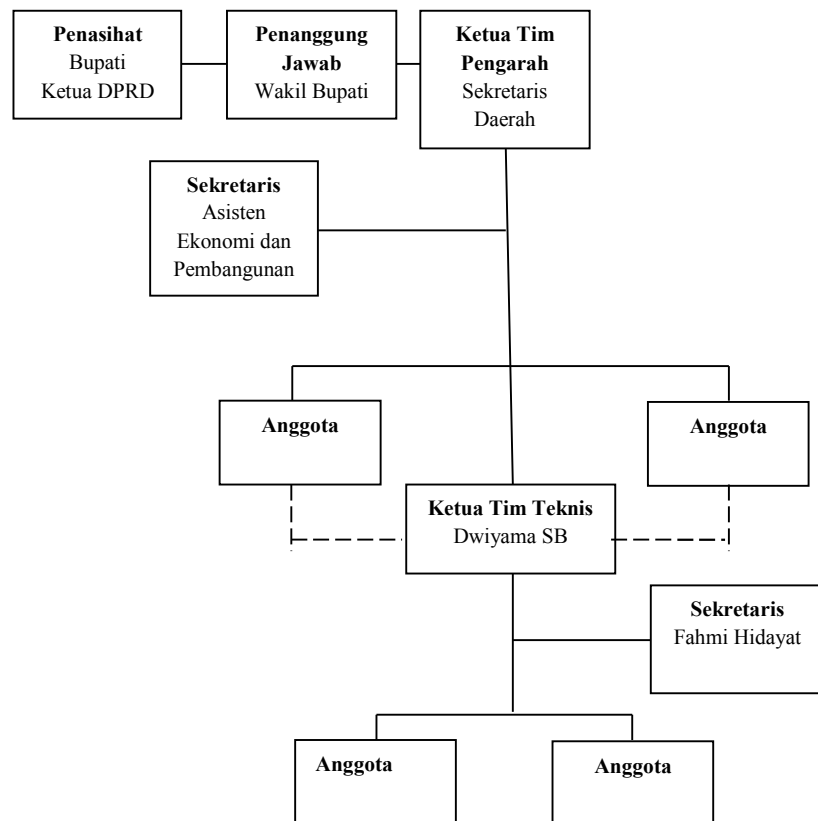
Dieng Kabupaten Wonosobo. TKPD bertugas melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi di antara SKPD Kabupaten Wonosobo dan pihak-pihak terkait dalam upaya pemulihan Kawasan Dieng dalam konteks DAS Serayu.

1) Visi

Adapun visi TKPD adalah “mengembalikan fungsi lindung Kawasan Dieng tanpa mengabaikan kepentingan ekonomi dan sosial budaya masyarakat”.

2) Struktur Organisasi TKPD

TKPD dibagi menjadi dua, yaitu terdiri dari Tim Pengarah dan Tim teknis. Adapun struktur Organisasi TKPD adalah sebagai berikut:



Gambar 4.1. Struktur Organisasi TKPD

TKPD merupakan inovasi yang diharapkan mampu mempercepat dan mengefektifkan upaya-upaya dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan hidup di Kawasan Dataran Tinggi Dieng. TKPD terdiri dari perwakilan seluruh komponen institusi Pemerintah lintas sektoral yang bekerjasama dengan NGO serta Masyarakat yang memiliki kepentingan serta kepedulian terhadap permasalahan lingkungan hidup di Kawasan Dataran Tinggi Dieng. Dimana TKPD menjadi sebuah tim kerja/forum yang dapat menjadi perantara antar institusi di Pemerintahan Kabupaten Wonosobo serta menyerap gagasan-gagasan dari kalangan NGO dan masyarakat.

Adapun kalangan NGO yang mampu dirangkul oleh TKPD antara lain yaitu LSM JAVLEC serta Bhineka Karya Wonosobo, dan dari kalangan intelektual baik secara pribadi maupun kelembagaan seperti IPB dan UGM. Dari kalangan swasta seperti PT Indonesia Power, PT Geodipa Energi, PDAM Wonosobo, juga turut melaksanakan program di Kawasan Dataran Tinggi Dieng. Serta di kalangan masyarakat Kawasan Dataran Tinggi Dieng yang peduli dengan kondisi kawasa tersebut juga turut membantu dalam upaya pemulihan Dieng.

Dalam melaksanakan PPD di Kawasan Dataran Tinggi Dieng, pihak-pihak tersebut harus mengacu pada road-map dan PPD dalam merancang program instansi, apabila ada kaitanya dengan Kawasan Dataran Tinggi Dieng. Namun yang terjadi selama ini masih menimbulkan permasalahan didalam internal TKPD, sehingga mempengaruhi kelangsungan pemulihan Kawasan Dieng.

2. Deskripsi Data Penelitian

Tim Kerja Pemulihan Dieng (TKPD) merupakan suatu inovasi dalam perwujudan kerjasama lintas sektoral. Meskipun TKPD merupakan sebuah kelembagaan dalam pemerintah, namun TKPD juga melibatkan *Non Government Organization* (NGO). Dengan adanya TKPD saat ini inisiatif untuk menyelesaikan persoalan Dieng tidak lagi menjadi inisiatif pemerintah saja, namun telah menjadi inisiatif banyak pihak. Pendekatan sektoral yang sering menjadi *barier* antar sektor untuk bekerjasama telah coba diubah menjadi pendekatan dengan upaya membangun jaringan,

baik pada tataran internal Pemerintah maupun pihak eksternal dengan kelompok-kelompok *private* dan organisasi masyarakat sipil. Serta pendekatan yang hanya menekankan pada persoalan fisik semata menjadi memperhatikan aspek sosial dan ekonomi masyarakat. Pelibatan banyak pihak berpotensi mengakumulasi kontribusi upaya penyelesaian persoalan Dieng yang dapat diorganisasi secara efektif.

Pada perkembangannya, TKPD telah berhasil menumbuhkan kesadaran bersama bahwa penyelesaian persoalan di Kawasan Dieng harus dilakukan secara bersama-sama, tidak lagi didominasi pemerintah. Dalam hal ini, NGO seperti LSM Javlec dan LSM Bhinekakarya Wonosobo serta akademisi baik perorangan maupun institusi seperti Institut Pertanian Bogor dan Universitas Gadjah Mada sudah mampu dirangkul oleh TKPD dalam ikut serta memberikan ide serta menjadi fasilitator dalam pelaksanaan PPD. Dari *private sector* seperti PT. Indonesia Power, PT. PDAM Wonosobo dan PT. Geodipa Energi juga sudah banyak mengucurkan dana dalam rangka mendukung PPD di Kawasan Dataran Tinggi Dieng.

Program yang telah dilakukan TKPD juga selalu didasarkan pada pelibatan masyarakat sebagai bagian penting program. Akan tetapi berbagai keberhasilan TKPD dan upaya pemulihan Dieng tidak berbanding lurus dengan peran pemerintah melalui Dinas-dinasnya. Masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yang

seharusnya bekerjasama dalam pelaksanaan PPD, masih mengelola lingkungan hidup di Kawasan Dataran Tinggi Dieng secara sendiri-sendiri/sektoral. Sehingga, dalam penanganan Kawasan Dataran Tinggi Dieng antar SKPD mengalami benturan kepentingan. Seperti yang terjadi antara Dinas Pertanian dan Dinas Kehutanan dan Perkebunan. Dimana Dinas Pertanian menginginkan bagaimana mendapatkan hasil pertanian yang melimpah dari Kawasan Dataran Tinggi Dieng, sedangkan dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan menginginkan bagaimana mengembalikan Kawasan Dataran Tinggi Dieng menjadi kawasan lindung. Begitu juga menurut salah satu pegawai BAPPEDA Kabupaten Wonosobo yaitu Bapak Agus yang mengatakan bahwa

“... kerjasama antar SKPD itu masih menjadi barang mahal, barang mewah. Ya untuk pelaksanaannya sampai sekarang ini masih sendiri-sendiri. Untuk benturan kepentingan dari masing-masing dinas tentunya masih ada. Misalnya saja antar Dinas Pertanian dan Dinas Kehutanan, dimana Dinas pertanian menginginkan bagaimana mendapatkan hasil pertanian yang melimpah dari Kawasan Dieng, sedangkan dari Dinas Kehutanan menginginkan bagaimana mengembalikan Kawasan Dataran Tinggi Dieng menjadi kawasan lindung..” (wawancara, 28 April 2014)

Permasalahan tersebut tentunya menjadikan kinerja TKPD dalam pelaksanaan PPD di Kawasan Dataran Tinggi Dieng menjadi tidak maksimal. TKPD tentunya harus mampu menyelesaikan permasalahan internal organisasinya terlebih dahulu. Sehingga, TKPD dapat menangani permasalahan Kawasan Dieng dengan lebih optimal.

Dalam menghadapi situasi demikian yang membutuhkan kinerja TKPD yang lebih baik dan sesuai dengan konsep kinerja maka indikator-

indikator yang membentuk suatu kinerja kelembagaan yang lebih baik harus dijalankan. Hal tersebut bertujuan agar ada penguatan kinerja TKPD dalam pelaksanaan PPD, sehingga percepatan penanganan permasalahan Kawasan Dieng dapat dilaksanakan. Adapun indikator-indikator kinerja tersebut diantaranya adalah:

a. Produktivitas

Sesuai gagasan awal, TKPD dibentuk untuk mengkoordinasikan upaya-upaya yang diperlukan melalui PPD dengan visi “mengembalikan fungsi lindung Kawasan Dieng tanpa mengabaikan kepentingan ekonomi dan sosial-budaya masyarakat”. Tim Kerja Pemulihan Dieng bertugas melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi di antara SKPD Kabupaten Wonosobo dan pihak-pihak terkait dalam upaya pemulihan Kawasan Dieng dalam konteks DAS Serayu. Meskipun merupakan sebuah kelembagaan di dalam Pemerintah, namun TKPD juga melibatkan unsur non Pemerintah, seperti swasta, LSM, dan akademisi.

Dukungan bagi upaya pemulihan Dieng datang dari kalangan NGO. Seperti dukungan dari JAVLEC yang pada tahun 2007-2010 memberikan fasilitasi bagi penguatan kelembagaan TKPD dan kelompok masyarakat. Bentuk-bentuk fasilitasi JAVLEC antara lain kampanye dan peningkatan kesadaran masyarakat, peningkatan kapasitas/kelembagaan bagi petani, masyarakat, Forum Peduli Dieng

(FPD), forum kader perencana desa berbasis lingkungan, asistensi teknis, serta perluasan jejaring dan dukungan melalui berbagai kegiatan. Selain JAVLEC ada pula tenaga ahli, pakar, dan individu yang aktif memberikan dukungan, ide, dan keahliannya untuk mengembangkan Program Pemulihan Dieng.

Pada tahun 2010, TKPD telah berhasil menyelesaikan *Road Map*. *Road Map* yang akan dijalankan sampai 2015 tersebut terdiri dari 6 (enam) *deliverable output*, yakni:

- 1) Pengendalian pemanfaatan ruang sesuai peruntukan dan daya dukung kawasan.
- 2) Penumbuhan kembali kesadaran dan modal sosial masyarakat (untuk berperilaku ramah lingkungan dalam pemanfaatan sumberdaya lahan), berbasis kearifan lokal.
- 3) Pengembangan sumber ekonomi yang tidak berbasis lahan.
- 4) Pengurangan risiko bencana melalui adaptasi dan mitigasi berbasis masyarakat.
- 5) Peningkatan kualitas keanekaragaman hayati serta mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
- 6) Penguatan peran dan pengembangan kolaborasi para pihak dalam mendukung Program pemulihan Dieng.

Secara umum, dinamika Program Pemulihan Dieng dan kelembagaannya dapat dipisahkan menjadi 3 (tiga) fase, yakni:

1) 2007 - 2009 : Pra-kondisi dan Uji-coba

Fase pra-kondisi meliputi pra-kondisi kelembagaan dan pra-kondisi program. Pra-kondisi kelembagaan dimulai dengan inisiasi kelembagaan, penguatan kelembagaan, *capacity building*, dan pengembangan dukungan multi-pihak. Pada level program, pra-kondisi dijalankan melalui kegiatan diskusi dan *expose* (program) dan pemetaan kebutuhan (*need assesment*). Kecamatan Kejajar, yakni Sembungan, Sikunang, Tieng, dan Tambi menjadi arena uji-coba TKPD untuk menjalankan Program Pemulihan Dieng. Selain keempat desa percontohan tersebut, fase uji-coba juga dilaksanakan dengan membangun demplot usaha wanatani lestari pada 4 (empat) desa lainnya di Kecamatan Kejajar, meliputi Kreo, Serang, Igirmranak, dan Buntu.

Dalam fase ini telah pula dimulai penyusunan *road map* pemulihan Dieng, dalam bentuk lokakarya. Para pihak yang mendukung aktivitas dalam fase pra-kondisi dan uji-coba meliputi Javlec, Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup (PPLH) Regional Jawa, dan PT Indonesia *Power*.

2) 2010 - 2011 : Reformulasi Strategi

Diskusi pembahasan dan finalisasi *road map* pemulihan Dieng sangat dominan dalam aktivitas TKPD, sehingga disebut fase reformulasi strategi. Meskipun demikian, kegiatan/aktivitas lain juga tetap berjalan. Rehabilitasi dan Konservasi Lahan Kawasan Dieng (RKLKD) untuk tahun 2010 dilaksanakan di Desa Mutisari dan Krinjing (Watumalang), serta Tlogo dan Menjer (Garung). Sedangkan RKLKD 2011 dilakukan di Slukatan (Mojotengah) dan Maron (Garung) dalam bentuk pemberian ternak dan pembuatan kelompok/komunitas peduli konservasi. Melalui program lain, pemberian bantuan ternak juga terjadi pada 4 (empat) desa di Kecamatan Kejajar, yakni Kejajar, Buntu, Kreo, dan Igirmranak.

Dalam fase Reformulasi Strategi ini juga diinisiasi program Kebun Bibit Sekolah (KBS). Setiap sekolah SD/MI/SMP/MTs/SMA/MA diberikan bantuan berupa benih, *polybag*, *screen*, alat siram, dan pupuk untuk membangun kebun bibit di lingkungan sekolah. Selain KBS, dibangun pula KBR (Kebun Bibit Rakyat) melalui skema program RHL (Rehabilitasi Hutan dan Lahan).

Program lain dalam fase ini antara PNPM Pariwisata. PNPM Pariwisata dijalankan di Sembungan (Kejajar). Sembungan dikembangkan sebagai desa wisata dengan *trade mark* Desa Tertinggi di Pulau Jawa.

3) 2011 – sekarang : Fase *Roadmap*

Road map Penyelamatan Dieng disusun untuk periode 5 (lima) tahun, yakni 2011-2015. *Road map* ini didasarkan pada 6 (enam) pilar isu dengan rumusan hasil yang ingin dicapai (*deliverable outputs*) sebagai berikut:

- a) Pengendalian pemanfaatan ruang sesuai peruntukan dan daya dukung kawasan.
- b) Penumbuhan kembali kesadaran dan modal sosial masyarakat (untuk berperilaku ramah lingkungan dalam pemanfaatan sumberdaya lahan), berbasis kearifan lokal.
- c) Pengembangan sumber ekonomi yang tidak berbasis lahan.
- d) Pengurangan risiko bencana melalui adaptasi dan mitigasi berbasis masyarakat.
- e) Peningkatan kualitas keanekaragaman hayati serta mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
- f) Penguatan peran dan pengembangan kolaborasi para pihak dalam mendukung Program pemulihan Dieng.

Untuk mencapai hasil tersebut, *roadmap* dibagi dalam 3 (tiga) fase/tahapan, yaitu (a) 2011-2012 : Replikasi Model Pengelolaan, (b) 2013-2014 : Adopsi dan Pengayaan Inovasi, dan (c) 2015 : Harmonisasi.

Meskipun berada dalam fase *roadmap*, namun aktivitas yang berjalan seolah tiada beda. Hal ini disebabkan belum adanya kebijakan yang jelas dalam dilaksanakannya *roadmap* dalam pelaksanaan PPD di Kawasan Dieng. Kebun Bibit Sekolah (KBS) tetap dilanjutkan dengan memberikan bantuan senilai 50 juta rupiah untuk 10 (sepuluh) sekolah dalam 1 (satu) kecamatan dengan total kecamatan terfasilitasi sebanyak 6 (enam) buah, termasuk Kejajar. Pengembangan Desa Wisata Sembungan pun tetap berlanjut. Melalui dana PNPM Pariwisata, dan dibangun jalan serta gardu/*gazebo* di desa tersebut.

Pada beberapa kali observasi dan wawancara kepada narasumber tentang produktivitas TKPD terkait program pemulihan Dieng, peneliti melihat untuk program fisik, TKPD telah menjalankan program-program tersebut dengan baik. Hal tersebut ditunjukkan dengan keberhasilan pengembangan desa wisata sembungan dan kebun bibit sekolah di Kabupaten Wonosobo. Namun untuk penerapan *road map* dalam pelaksanaan PPD di Kawasan Dieng tidak berjalan sebagaimana seharusnya. Hal tersebut ditunjukkan dengan tidak diacunya *road map* pemulihan dieng oleh masing-masing SKPD dalam menyusun atau menjalankan program yang berkaitan dengan Kawasan dieng. Sehingga sinkronisasi program antar SKPD dalam pelaksanaan PPD di Kawasan Dieng hampir tidak ada.

Berdasarkan wawancara dan observasi peneliti yang dilakukan dalam melihat kinerja TKPD dalam pelaksanaan PPD di Kawasan Dieng sesuai dengan produktivitas TKPD dalam menjalankan program sudah dapat disimpulkan bahwa sejauh ini TKPD telah berupaya untuk menjalankan programnya sesuai tenggat waktu yang ada. Untuk meningkatkan produktivitas TKPD dalam pelaksanaan PPD telah dilakukan evaluasi kelembagaan oleh tim yang diberi wewenang untuk melakukan evaluasi TKPD oleh pemerintah Wonosobo pada akhir tahun 2013.

b. Responsivitas

Hal lain yang mempengaruhi kinerja dalam pelaksanaan program adalah kemampuan organisasi dalam merealisasikan visi dan tujuannya. Visi dan tujuan merupakan unsur vital dalam organisasi, dan untuk mengetahui apakah kinerja organisasi sudah baik atau belum maka dapat dilihat dari pencapaian visi dan tujuan melalui program-programnya yang memenuhi kebutuhan masyarakat.

Dalam mewujudkan visi program pemulihan dieng yaitu “mengembalikan fungsi lindung Kawasan Dieng, tanpa mengabaikan kepentingan ekonomi dan sosial budaya masyarakat”, TKPD menerapkan *road map* sebagai sebuah arahan kerja yang lebih

berkesinambungan dan sistematis bagi PPD. *Road map* secara komprehensif merangkum pendekatan atau strategi untuk mewujudkan penyelesaian menyeluruh, sesuai visi “mengembalikan fungsi lindung Kawasan Dieng tanpa mengabaikan kepentingan ekonomi dan sosial budaya masyarakat”. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Agus dari BAPPEDA sebagai berikut:

“Visi dari pada TKPD adalah mengembalikan fungsi lindung Kawasan Dieng tanpa mengabaikan kepentingan ekonomi dan sosial budaya masyarakat, dan itu tertuang dalam *roadmap* pemulihan Dieng sebagai acuan Dinas-dinas terkait dalam merancang maupun melaksanakan programnya yang terkait dengan Kawasan Dieng...” (wawancara, 28 April 2014)

TKPD dalam melaksanakan program yang terkait dengan Kawasan Dieng mengacu pada enam rumusan hasil yang ingin dicapai (*deliverable outputs*) pada enam (6) pilar isu yang tertuang dalam *road map*, yang terdiri dari (1) Pengendalian pemanfaatan ruang sesuai peruntukan dan daya dukung kawasan, (2) Penumbuhan kembali kesadaran dan modal sosial masyarakat (untuk berperilaku ramah lingkungan dalam pemanfaatan sumberdaya lahan), berbasis kearifan lokal, (3) Pengembangan sumber ekonomi yang tidak berbasis lahan, (4) Pengurangan risiko bencana melalui adaptasi dan mitigasi berbasis masyarakat, (5) Peningkatan kualitas keanekaragaman hayati serta mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, dan (6) Penguatan peran dan pengembangan kolaborasi para pihak dalam mendukung Program

pemulihan Dieng. Adapun penjabaran enam (6) rumusan hasil yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

- 7) Pengendalian pemanfaatan ruang sesuai peruntukan dan daya dukung kawasan.

Hasil yang ingin dicapai dalam pilar isu ini adalah adanya pemanfaatan ruang Kawasan Dieng sesuai arahan, mempertimbangkan daya dukung kawasan, serta dikaitkan dengan dinamika demografi Kawasan Dieng.

- 8) Penumbuhan kembali kesadaran dan modal sosial masyarakat (untuk berperilaku ramah lingkungan dalam pemanfaatan sumberdaya lahan), berbasis kearifan lokal.

Dalam pilar isu ini, hasil yang ingin dicapai adalah:

- a) Munculnya kesadaran kolektif masyarakat Dieng untuk berbuat nyata, sebagai dampak dari terbangunnya modal sosial, kapasitas dan kesadaran tentang adanya problematika degradasi Kawasan Dieng dan akibat yang ditimbulkannya.
- b) Tumbuhnya kembali kesadaran dan modal sosial masyarakat untuk berperilaku ramah lingkungan dalam pemanfaatan sumberdaya lahan (dalam berbagai ranah) berbasis kearifan lokal.
- c) Meningkatnya kapasitas secara berkelanjutan dan mandiri (*continual internal capacity building*) pada masyarakat.

- d) Meningkatnya proporsi swadaya masyarakat desa sebagai indikator modal sosial.
- e) Berfungsinya kelembagaan lokal secara mandiri.
- f) Munculnya komitmen untuk melaksanakan kesepakatan kemitraan dalam mendukung pemulihan kawasan.

9) Pengembangan sumber ekonomi yang tidak berbasis lahan.

Hasil yang ingin dicapai adalah:

- a) Munculnya sumber-sumber ekonomi masyarakat sebagai alternatif dan pengalihan dari aktifitas ekonomi yang selama ini berbasis lahan dengan metode tidak ramah lingkungan.
- b) Berkembangnya koperasi dan klaster industri di Kawasan Dieng sebagai implikasi pengalihan potensi sumber-sumber ekonomi baru yang tidak berbasis lahan.
- c) Berubahnya proporsi mata pencaharian masyarakat sebagai akibat dari transformasi dan berkembangnya peluang/pilihan sumber-sumber ekonomi.

10) Pengurangan risiko bencana melalui adaptasi dan mitigasi berbasis masyarakat.

Hasil yang ingin dicapai adalah:

- a) Meningkatnya kesiapan masyarakat dalam adaptasi dan mitigasi bencana.
- b) Berkurangnya resiko bencana.

11) Peningkatan kualitas keanekaragaman hayati serta mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Hasil yang ingin dicapai adalah:

- a) Internalisasi pemanfaatan kalender musim oleh petani (sebagai wujud adaptasi terhadap perubahan iklim).
- b) Adanya transformasi tentang metode dan pergiliran budidaya pertanian (sebagai wujud adaptasi terhadap perubahan iklim).
- c) Menurunnya penggunaan pupuk dan pestisida pabrikan (sebagai aktifitas mitigasi terhadap perubahan iklim).
- d) Lestarinya plasma nutfah di Kawasan Dieng (sebagai aktifitas mitigasi terhadap perubahan iklim)

12) Penguatan peran dan pengembangan kolaborasi para pihak dalam mendukung Program pemulihan Dieng.

Hasil yang ingin dicapai adalah:

- a) Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang lebih baik dalam pengelolaan isu-isu lintas sektoral yang terkait dengan PPD.
- b) Meningkatnya peran serta para pihak (misalnya: pembayaran jasa imbal lingkungan (*payment for environmental services*), CSR, *trust fund/endowment fund* dan sebagainya.) sebagai wujud kepedulian terhadap isu degradasi Kawasan Dieng.

- c) Berfungsinya regulasi insentif/disinsentif yang mendukung inisiatif pemulihan Kawasan Dieng.
- d) Harmonisasi kemitraan antar pihak dalam bentuk inisiatif para pihak (*collaborative multistakeholder initiative*) penanganan permasalahan Dieng yang terlembaga (semacam lembaga publik).
- e) Dihasilkannya RPJMD 2016-2020 Kabupaten Wonosobo yang sudah berwawasan lingkungan (sebagai dampak dari keberhasilan pengarusutamaan isu pemulihan Kawasan Dieng dan proses transformasi oleh para pihak).

Adanya rumusan hasil diatas ialah untuk mengukur pencapaian TKPD dalam realisasi program terkait enam (6) pilar isu strategis tersebut, sehingga percepatan pemulihan Kawasan Dieng dapat terlaksana. Realisasi program tersebut juga digunakan untuk mengukur responsivitas TKPD dalam pelaksanaan PPD di Kawasan Dieng. Realisasi enam (6) pilar isu strategis tersebut rata-rata sudah terpenuhi. Mulai dari pengendalian pemanfaatan ruang sesuai peruntukan dan daya dukung kawasan, dimana TKPD dalam hal ini telah melakukan transformasi pemahaman tentang tata ruang kepada masyarakat luas. Transformasi juga dikaitkan dengan entitas pemerintahan terkecil yang memiliki perencanaan, yaitu desa. Replikasi perencanaan desa berbasis tata ruang di seluruh Kawasan

Dieng telah dilaksanakan pada dua Desa, yaitu Buntu dan Kreo. Namun RPJMDes pada saat ini belum diterapkan secara keseluruhan pada desa-desa yang lainnya di Kawasan Dataran Tinggi Dieng. Pada saat ini, penyusunan RPJMDes masih menginduk pada RPJMD Kabupaten Wonosobo secara umum, peraturan yang mengatur secara khusus tentang penyusunan RPJMDes Kawasan Dieng berbasis keruangan belum terlaksana.

Kemudian penumbuhan kembali kesadaran dan modal sosial masyarakat (untuk berperilaku ramah lingkungan dalam pemanfaatan sumberdaya lahan), berbasis kearifan lokal, dalam hal ini TKPD melakukan pendekatan melalui bidang pendidikan, budaya dan agama. Hal ini dipercaya bisa menjadi perantara dalam membangun kapasitas dan modal sosial terkait konservasi. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga yang merupakan bagian dari TKPD melakukan pendekatan melalui pendidikan. Dengan cara menerapkan kurikulum yang berkaitan dengan pemulihan Kawasan Dieng. Sedangkan tim teknis melakukan pendekatan budaya dan agama melalui tokoh-tokoh masyarakat desa setempat. TKPD merangkul tokoh-tokoh masyarakat, memberikan arahan dan pengertian terkait kondisi Kawasan Dieng dan mengajak untuk ikut membantu penyelamatan Kawasan Dieng. Pada sisi kelembagaan masyarakat, TKPD juga melakukan pemberdayaan kelembagaan lokal secara lebih aktif dan partisipatif karena ada modalitas

basis massa pada lembaga-lembaga lokal/tradisional tersebut. TKPD juga mengembangkan kader-kader lingkungan secara mandiri atau fasilitasi proses transformasi antar pelaku di masyarakat.

Terkait pilar isu selanjutnya yaitu, pengembangan sumber ekonomi yang tidak berbasis lahan. Dalam hal ini TKPD telah mengembangkan sumber ekonomi yang tidak berbasis lahan, seperti mengembangkan bidang pariwisata dan industri rumah tangga. Secara khusus, TKPD mendorong pengembangan pariwisata berbasis masyarakat, seperti yang sudah berhasil hingga sekarang ini adalah Desa Wisata Sembungan, yang dikelola sendiri oleh masyarakat setempat. Di Desa Sembungan tersebut juga sudah memiliki homestay yang dikelola oleh masyarakat sendiri dengan obyek wisata golden sunrise sikunir. Hal ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Yudhi dari Dinas Pariwisata sebagai berikut:

“...iya, Sembungan pariwisatanya dikelola sendiri oleh masyarakat setempat. Kami hanya mem-*followup* saja, memberikan pengarah. Tapi pengelolaanya semua sudah masyarakat yang mengelola...” (wawancara, 28 April 2014).

Selain Desa Wisata, juga ada home industri yang memanfaatkan hasil pertanian setempat. Di Kawasan Dataran Tinggi Dieng ada hasil pertanian khas, yaitu carica. TKPD mendorong adanya home industri pengolahan produk carica.

Pilar isu yang berikutnya adalah, pengurangan risiko bencana melalui adaptasi dan mitigasi berbasis masyarakat. TKPD dalam hal ini sudah membentuk sistem mitigasi bencana berbasis desa minimal dalam bentuk pemetaan daerah rawan bencana. TKPD juga telah mengupayakan pengurangan resiko bencana berbasis ekosistem. Namun masyarakat belum mampu di rangkul untuk melakukan pemeliharaan ekosistem di Kawasan Dieng. Berikutnya adalah pilar isu peningkatan kualitas keanekaragaman hayati serta mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Dalam peningkatan kualitas keanekaragaman hayati TKPD telah melakukan sosialisasi di beberapa Desa di Dataran Tinggi Dieng seperti Tieng dan Sembungan. Yang menjadi sasaran adalah petani yang merupakan kelompok paling rentan menerima risiko dari perubahan iklim dari proses budidaya. Yang dilakukan adalah mendorong pemakaian pestisida alami atau agensia hayati dalam proses budidaya. Selain itu, beberapa *stakeholder* dan TKPD sendiri juga sudah mengenalkan jenis flora yang bisa memberikan nilai tambah maupun memiliki nilai keanekaragaman hayati tinggi. Budidaya tanaman keras yang memiliki nilai ekonomi tinggi sudah diperkenalkan, seperti kopi, terong belanda dan strawberry.

Terakhir adalah penguatan peran dan pengembangan kolaborasi parapihak dalam mendukung Program pemulihan Dieng. dalam hal ini TKPD sudah terbentuk dan memiliki roodmap sebagai

acuanya. Sedangkan dalam kolaborasi parapihak, hingga sekarang ini, beberapa SKPD belum memandang TKPD sebagai sebuah tim kerja/forum antar sektor dimana program-program yang bersangkutan dengan Kawasan Dieng wajib diintegrasikan. TKPD dianggap hanya sebagai orang-orang tertentu yang ada dalam Tim Teknis. Hal ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Yudhi dari Dinas Pariwisata pada wawancara 28 April 2014, yang menganggap bahwa Dinas Pariwisata tidak dilibatkan dalam TKPD, dan orang TKPD hanyalah tim teknis seperti Bapak Dwiyama.

Pada beberapa kali observasi di Kawasan Dieng dan wawancara kepada para narasumber terkait enam pilar isu tersebut, peneliti melihat beberapa program dari pada pilar isu tersebut seperti Desa Wisata Sembungan sudah terkoordinir dan dimanfaatkan oleh masyarakat dengan baik. Hal tersebut ditunjukkan dengan banyaknya wisatawan baik lokal maupun mancanegara yang mengetahui dan datang ke obyek wisata sikunir, yang dikelola oleh masyarakat Desa Sembungan.

Berdasarkan wawancara dan observasi peneliti yang dilakukan dalam melihat kinerja TKPD sesuai dengan responsivitas, sudah dapat disimpulkan bahwa sejauh ini TKPD sudah berupaya melaksanakan program. Untuk menjaga dan meningkatkan kinerja yang telah dilaksanakan TKPD melakukan koordinasi setiap tahunnya

yang melibatkan perwakilan masing-masing Dinas yang ada di Wonosobo.

c. Akuntabilitas

Pertanggungjawaban atau akuntabilitas TKPD sangat berhubungan dengan aspek kepuasan masyarakat dalam menerima program. Pertanggungjawaban TKPD dalam melaksanakan program merupakan salah satu aspek yang mempengaruhi penilaian masyarakat atas pelaksanaan program. Pada penelitian ini dalam mengetahui tentang akuntabilitas TKPD terhadap masyarakat saat melaksanakan program, peneliti juga berwawancara langsung dengan masyarakat sasaran program yang memiliki permasalahan terkait lahanya dan masyarakat yang memiliki lahan paling luas selain dengan narasumber dari masing-masing dinas.

Pada indikator akuntabilitas atau pertanggungjawaban TKPD dalam melaksanakan program kepada masyarakat sebagai sasaran penerima program belum maksimal. Hal ini dapat dilihat dari tingkat kepercayaan masyarakat terhadap program yang masuk ke Kawasan Dieng. Hal ini diungkapkan oleh salah satu masyarakat sasaran penerima program Bapak Mukhozin yaitu:

“...program banyak yang masuk kesini, tapi kalau dari dinas-dinas itu kan mereka taunya hanya teori. Mau bilang bibit ini bagus bibit ini unggul, tapi kalau di tanam di sini ya sama saja, yang tau di lapangan gimana kan petani. Kalau dinas pertanian

contohin dulu, baru kita percaya...” (wawancara, 29 april 2014).

Hal yang sama juga dibuktikan oleh peneliti bahwa akuntabilitas TKPD dalam pelaksanaan PPD belum maksimal. Peneliti membuktikan dengan bertanya langsung kepada beberapa narasumber dari masing-masing dinas dengan menanyakan hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan program masing-masing dinas, apakah sudah mengacu pada *road map* penyelamatan dieng, dan melakukan kerjasama lintas sektoral sehingga dapat menghasilkan program bersama yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada pada masyarakat Kawasan Dieng. peneliti menemukan bahwa banyak dinas yang melaksanakan program yang berkaitan dengan Kawasan Dieng, tidak mengacu kepada *road map* penyelamatan Dieng. sedangkan kerjasama antar dinas juga belum terlaksana, sehingga program bersama yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada pada masyarakat Kawasan Dieng belum terpenuhi. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Usman dari Dinas Pertanian:

“...ya kami menggunakan *road map* kami sendiri kalau melaksanakan program. kalau untuk kerjasama antar dinas, dimanapun juga tidak bekerjasama. Jangankan di Wonosobo, di seluruh Indonesia juga pasti kerja sendiri-sendiri..” (wawancara, 9 Mei 2014).

Masyarakat sasaran penerima program yang lain yaitu Bapak Mansyur yang ditemui juga memberikan komentar senada terkait dengan pelaksanaan program di Kawasan Dieng sebagai berikut:

“... kalau disini disuruh nanam pohon kaya yang dibawah ya gak bisa. *Paling* kalau suruh nanam seperti itu ya kami nggeh nggeh aja. Tapi ya tau sendiri lah *mbak..*” (wawancara, 29 April 2014).

Adanya dinas yang bekerja secara sendiri-sendiri dan tidak mengacu pada *road map* pemulihan Dieng sehingga program-program yang dihasilkan tidak memuat nilai-nilai yang ada pada masyarakat Kawasan Dieng, ditakutkan akan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah. Hal tersebut juga dapat dijadikan indikasi bahwa TKPD sebagai sebuah tim kerja/forum yang dapat menjadi perantara antar institusi di Pemerintahan Kabupaten Wonosobo serta menyerap gagasan-gagasan dari kalangan NGO dan masyarakat kurang berhasil dalam menjalankan fungsinya.

Seharusnya Pemerintah, NGO serta masyarakat yang merupakan satu-kesatuan dalam TKPD berkolaborasi di dalam satuan Tim Pengarah dan Tim teknis. Tim Pengarah yang beranggotakan 40 orang, diantaranya yaitu Bupati dan Ketua DPRD Wonosobo selaku Penasehat, Wakil Bupati selaku Penanggung jawab, Sekretaris Daerah sebagai Ketua, Asisten Ekonomi dan Pembangunan selaku sekretaris, dan anggota yang didalamnya meliputi Kepala Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial, Kepala Kehutanan dan Perkebunan, Kepala Tenaga Kerja dan Trnsmigrai, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan,

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koprasi, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kepala Dinas Pariwisata, Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga, Kepala Kantor Pertanahan, Kepala Kantor Lingkungan Hidup, Kepala Kantor Departemen Agama, Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Kepala Bagian Perekonomian, Kepala Bagian Tata Pemerintahan, Kepala Bagian Hukum, Kepala Bagian Hubungan Masyarakat, Camat Garung, Camat Watumalang, Camat Leksono, Camat Kejajar, Camat Sukoharjo, Camat Selomerto, Camat Mojotengah, Keplaa Komisi A DPRD, Keplaa Komisi B DPRD, Keplaa Komisi C DPRD, Keplaa Komisi D DPRD, Kepala BPDAS Serayu Opak Progo, Kepala BKSDA, Administratur Perhutani KPH Kedu Utara, Direktur Eksekutif JAVLEC, Direktur Utama PDAM, dan General Manager PT.Indonesia Power UBP Mrica. Serta Tim Teknis yang beranggotakan 17 orang yang berasal dari kalangan Pemerintah Kabupaten, praktisi, akademisi, dan LSM. Diantaranya adalah Dwiyama SB selaku Ketua, Fahmi Hidayat selaku Sekretaris, dan anggota yang terdiri dari One Andang Wardoyo, Andreas SN, Nurudin Ardiyanto, Iwan Widayanto, Kuncoro Adam Suharto, Agus Dwiatmojo, Agus Raharjo Saniyo, Warih Suryokoco, Sutono, Tono Prihatono, Widodo Estudadi, Irfan Bakhtiar, Agus Afifanto, Muhammad Chehafudin, Nurwachid Juni Adi, seharusnya dapat berkolaborasi dengan baik.

Hal tersebut dikarenakan permasalahan di Dataran Tinggi Dieng merupakan permasalahan yang kompleks. Hal ini menyangkut tidak hanya masalah lingkungan hidup saja, namun juga masalah ekonomi, sosial dan budaya. Hal ini menjadikan TKPD harus berkolaborasi untuk melaksanakan program yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada pada masyarakat.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa masih adanya program-program dinas yang merupakan satu-kesatuan dari TKPD yang belum sesuai dengan nilai-nilai yang ada pada masyarakat Kawasan Dieng, dan belum adanya kolaborasi antar dinas dalam menjalankan program terkait Kawasan Dieng menjadikan internal TKPD mengalami perpecahan, sehingga tidak dapat menjalankan PPD dengan lebih baik. Dengan melihat hal tersebut, maka TKPD dalam hal akuntabilitas belum maksimal dalam melaksanakan program yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada pada masyarakat Kawasan Dieng.

B. Pembahasan

Sesuai dengan konsep, kinerja ialah pencapaian atau hasil kerja dalam kegiatan atau program yang telah direncanakan suatu organisasi atau lembaga guna mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan dalam jangka waktu tertentu. Begitu pentingnya kinerja suatu organisasi dalam mencapai tujuannya maka perlu dilakukan penilaian kinerja. Tim Kerja Pemulihan Dieng (TKPD)

merupakan suatu inovasi dalam perwujudan kerjasama lintas sektoral. Meskipun TKPD merupakan sebuah kelembagaan dalam pemerintah, namun TKPD juga melibatkan *Non Government Organization* (NGO). Dengan adanya TKPD saat ini inisiatif untuk menyelesaikan persoalan Dieng tidak lagi menjadi inisiatif pemerintah saja, namun telah menjadi inisiatif banyak pihak.

Pendekatan sektoral yang sering menjadi *barier* antar sektor untuk bekerjasama telah coba diubah menjadi pendekatan dengan upaya membangun jaringan, baik pada tataran internal Pemerintah maupun pihak eksternal dengan kelompok-kelompok *private* dan organisasi masyarakat sipil. Serta pendekatan yang hanya menekankan pada persoalan fisik semata menjadi memperhatikan aspek sosial dan ekonomi masyarakat. Pelibatan banyak pihak berpotensi mengakumulasi kontribusi upaya penyelesaian persoalan Dieng yang dapat diorganisasi secara efektif.

Berdasarkan keputusan Bupati Wonosobo nomor 180 / 25 / 2007 tentang pembentukan Tim Kerja Pemulihan Dieng Kabupaten Wonosobo, menjelaskan bahwa TKPD merupakan tim kerja yang bertugas melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi di antara SKPD Kabupaten Wonosobo dan pihak-pihak terkait, dalam upaya pemulihan Kawasan Dieng dalam konteks DAS Serayu. Pemerintah beranggapan bahwa TKPD dapat mempercepat pemulihan Kawasan Dieng.

TKPD memiliki peranan penting dalam koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi dalam pelaksanaan program yang selama ini dilaksanakan secara sendiri-sendiri oleh masing-masing instansi, baik pemerintah maupun non-pemerintah. Sebagai sebuah inovasi tim kerja/forum yang baru maka TKPD harus mampu memberikan kinerja yang maksimal agar dapat melaksanakan PPD di Kawasan Dieng. Untuk menciptakan kinerja yang maksimal dibutuhkan indikator sebagai sebuah standar.

Dari hasil penelitian dan analisa data pada semua aspek kinerja, Agus Dwiyanto (2006 : 50) mengukur kinerja birokrasi publik berdasar adanya indikator yang secara lebih lanjut dijelaskan sebagai berikut :

1. Produktivitas

Konsep produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai rasio antara *input* dengan *output*. Konsep produktivitas dirasa terlalu sempit dan kemudian *General Accounting Office* (GAO) mencoba mengembangkan satu ukuran produktivitas yang lebih luas dengan memasukkan seberapa besar pelayanan publik itu memiliki hasil yang diharapkan sebagai salah satu indikator kinerja yang penting.

2. Kualitas Layanan

Isu mengenai kualitas layanan cenderung semakin menjadi penting dalam menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik. Banyak pandangan negatif yang terbentuk mengenai organisasi publik muncul karena ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diterima dari organisasi publik.

3. Responsivitas

Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Secara singkat responsivitas disini menunjuk pada keselarasan antara program dan kegiatan

pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsivitas dimasukkan sebagai salah satu indikator kinerja karena responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan organisasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Responsivitas yang rendah ditunjukkan dengan ketidakselarasan antara pelayanan dengan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut jelas menunjukkan kegagalan organisasi dalam mewujudkan misi dan tujuan organisasi publik. Organisasi yang memiliki responsivitas rendah dengan sendirinya memiliki kinerja yang jelek pula.

4. Responsibilitas

Responsibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit maupun implisit. Oleh sebab itu, responsibilitas bisa saja pada suatu ketika berbenturan dengan responsivitas.

5. Akuntabilitas

Akuntabilitas Publik menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat publik yang dipilih oleh rakyat. Asumsinya adalah bahwa para pejabat politik tersebut karena dipilih oleh rakyat, dengan sendirinya akan selalu merepresentasikan kepentingan rakyat. Dalam konteks ini, konsep dasar akuntabilitas publik dapat digunakan untuk melihat seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik itu konsisten dengan kehendak masyarakat banyak. Kinerja organisasi publik tidak hanya bisa dilihat dari ukuran internal yang dikembangkan oleh organisasi publik atau pemerintah, seperti pencapaian target. Kinerja sebaiknya harus dinilai dari ukuran eksternal, seperti nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Suatu kegiatan organisasi publik memiliki akuntabilitas yang tinggi kalau kegiatan itu dianggap benar dan sesuai dengan nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat.

Dari kelima indikator diatas peneliti memilih untuk menggunakan tiga indikator saja yaitu produktivitas, responsivitas, dan akuntabilitas. Ketiga indikator ini dipilih dengan alasan bahwa indikator-indikator ini dirasa telah mewakili dari beberapa indikator yang banyak digunakan

untuk menilai kinerja suatu organisasi publik dari dalam dan luar organisasi.

Menurut Agus Dwiyanto (2006 : 50) konsep produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi tetapi juga efektivitas pelayanan. Dengan demikian, produktifitas dapat digunakan untuk mengukur kinerja dari dalam organisasi. Dalam hal pelaksanaan PPD, produktifitas dari Tim Kerja Pemulihan Dieng dapat dilihat dari realisasi program yang terlaksana dalam kurun waktu tertentu.

Sedangkan responsivitas merupakan indikator kinerja yang berorientasi pada proses. Responsivitas ini dimasukkan sebagai salah satu indikator kinerja karena responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan organisasi publik dalam merealisasikan visi dan tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Mengenai akuntabilitas, Agus Dwiyanto (2006 : 57) mengemukakan bahwa akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai-nilai dan norma eksternal yang ada di masyarakat atau yang dimiliki oleh para *stakeholders*. Acuan pelayanan yang digunakan oleh organisasi publik juga dapat menunjukkan tingkat akuntabilitas pemberian pelayanan publik. Acuan pelayanan yang dianggap paling penting oleh suatu organisasi publik adalah dapat merefleksikan pola pelayanan yang

dipergunakan yaitu pola pelayanan yang akuntabel yang mengacu pada kepuasan publik sebagai penerima layanan. Dengan demikian, akuntabilitas TKPD dalam Pelaksanaan PPD merupakan bentuk pertanggungjawaban TKPD atas penyelenggara PPD kepada seluruh pihak yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung.

Untuk menjawab rumusan masalah yang terdapat pada bab I yaitu bagaimana kinerja Tim Kerja Pemulihan Dieng dalam pelaksanaan program pemulihan dieng di Kawasan Dataran Tinggi Dieng, yaitu kinerja TKPD dirasakan belum maksimal, yang diperoleh dari 3 (tiga) indikator yaitu produktivitas, responsivitas, dan akuntabilitas.

Dalam mengukur kinerja, produktivitas menjadi salah satu penentu tercapainya kinerja yang maksimal, karena dari produktivitas itu akan terlihat bagaimana suatu organisasi merealisasikan programnya dalam kurun waktu tertentu. Produktivitas menjadi indikator penting dalam menentukan kinerja TKPD dalam pelaksanaan PPD. Realisasi program harus dicapai TKPD dalam kurun waktu sesuai dengan berlakunya *road map*.

Produktivitas TKPD dalam pelaksanaan program dalam kurun waktu tertentu, untuk program yang bersifat fisik cukup maksimal dalam pelaksanaannya. Sesuai dengan observasi dan wawancara peneliti, dimana

pada tahun 2007 - 2009 yang merupakan fase Pra-kondisi dan Uji-coba, Pada level program, pra-kondisi dijalankan melalui kegiatan diskusi dan *expose* (program) dan pemetaan kebutuhan (*need assesment*). Pada level program uji-coba, TKPD menjalankan Program Pemulihan Dieng melalui *mainstreaming* isu pemulihan Dieng, *raising awareness*, kampanye, dan fasilitasi penguatan kelembagaan dalam hal ini Forum Peduli Dieng. Selain itu, fase uji-coba juga dilaksanakan dengan membangun demplot usaha wanatani.

Sedangkan pada tahun 2010 - 2011 yaitu fase Reformulasi Strategi, dalam rentang 2 (dua) tahun, diskusi pembahasan dan finalisasi *road map* pemulihan Dieng sangat dominan dalam aktivitas TKPD, sehingga disebut fase reformulasi strategi. Dalam fase Reformulasi Strategi ini juga diinisiasi program Kebun Bibit Sekolah (KBS). Selain KBS, dibangun pula KBR (Kebun Bibit Rakyat) melalui skema program RHL (Rehabilitasi Hutan dan Lahan). Program lain yang bergulir di dalam fase ini antara lain MDGs dari CISForm dan Kemitraan, pinjaman lunak dari BUMN PT Biro Klasifikasi Indonesia, dan PNPM Pariwisata. Selain itu Sembungan dikembangkan sebagai desa wisata dengan *trade mark* Desa Tertinggi di Pulau Jawa. Sedangkan pada tahun 2011 – sekarang yang merupakan Fase *Road map*, aktivitas yang berjalan seolah tiada beda.

Sedangkan untuk program yang bersifat kelembagaan dirasa tidak maksimal. Hal tersebut ditunjukkan dengan tidak diacunya *road map* pemulihan dieng oleh masing-masing SKPD dalam menyusun atau

menjalankan program yang berkaitan dengan Kawasan dieng. Sehingga sinkronisasi program antar SKPD dalam pelaksanaan PPD di Kawasan Dieng hampir tidak ada.

Responsivitas merupakan indikator kinerja yang berorientasi pada proses. Responsivitas ini dimasukkan sebagai salah satu indikator kinerja karena responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan organisasi publik dalam merealisasikan visi dan tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Secara singkat responsivitas disini menunjuk pada keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsivitas yang rendah ditunjukkan dengan ketidakselarasan antara pelayanan dengan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut jelas menunjukkan kegagalan organisasi dalam mewujudkan misi dan tujuan organisasi publik. Organisasi yang memiliki responsivitas rendah dengan sendirinya memiliki kinerja yang jelek pula (Agus Dwiyanto, 2006 : 50).

Uraian di atas menjadi suatu interpretasi yang banyak dikembangkan dalam suatu organisasi kerja dalam mewujudkan misi dan tujuannya. TKPD sebagai organisasi publik dalam hal ini belum maksimal

dalam menjalankan misi dan tujuannya. Hal ini dapat dilihat dari perwujudan visi program pemulihan dieng yaitu “mengembalikan fungsi lindung Kawasan Dieng, tanpa mengabaikan kepentingan ekonomi dan sosial budaya masyarakat”. TKPD dalam melaksanakan program yang terkait dengan Kawasan Dieng mengacu pada enam rumusan hasil yang ingin dicapai (*deliverable outputs*) pada enam (6) pilar isu yang tertuang dalam *road map*, yang terdiri dari (1) Pengendalian pemanfaatan ruang sesuai peruntukan dan daya dukung kawasan, (2) Penumbuhan kembali kesadaran dan modal sosial masyarakat (untuk berperilaku ramah lingkungan dalam pemanfaatan sumberdaya lahan), berbasis kearifan lokal, (3) Pengembangan sumber ekonomi yang tidak berbasis lahan, (4) Pengurangan risiko bencana melalui adaptasi dan mitigasi berbasis masyarakat, (5) Peningkatan kualitas keanekaragaman hayati serta mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, dan (6) Penguatan peran dan pengembangan kolaborasi para pihak dalam mendukung Program pemulihan Dieng.

Realisasi enam (6) pilar isu strategis tersebut rata-rata sudah terpenuhi. Mulai dari pengendalian pemanfaatan ruang sesuai peruntukan dan daya dukung kawasan, dimana TKPD dalam hal ini telah melakukan transformasi pemahaman tentang tata ruang kepada masyarakat luas. Transformasi juga dikaitkan dengan entitas pemerintahan terkecil yang memiliki perencanaan, yaitu desa. Kemudian

penumbuhan kembali kesadaran dan modal sosial masyarakat (untuk berperilaku ramah lingkungan dalam pemanfaatan sumberdaya lahan), berbasis kearifan lokal, dalam hal ini TKPD melakukan pendekatan melalui bidang pendidikan, budaya dan agama. Terkait pilar isu selanjutnya yaitu, pengembangan sumber ekonomi yang tidak berbasis lahan. Dalam hal ini TKPD telah mengembangkan sumber ekonomi yang tidak berbasis lahan, seperti mengembangkan bidang pariwisata dan industri rumah tangga. Secara khusus, TKPD mendorong pengembangan pariwisata berbasis masyarakat, seperti yang sudah berhasil hingga sekarang ini adalah Desa Wisata Sembungan. Pilar isu yang berikutnya adalah, pengurangan risiko bencana melalui adaptasi dan mitigasi berbasis masyarakat. TKPD dalam hal ini sudah membentuk sistem mitigasi bencana berbasis desa minimal dalam bentuk pemetaan daerah rawan bencana. TKPD juga telah mengupayakan pengurangan resiko bencana berbasis ekosistem, meskipun masyarakat belum mampu di rangkul untuk melakukan pemeliharaan ekosistem di Kawasan Dieng. Berikutnya adalah pilar isu peningkatan kualitas keanekaragaman hayati serta mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Dalam peningkatan kualitas keanekaragaman hayati TKPD telah melakukan sosialisasi di beberapa Desa di Dataran Tinggi Dieng seperti Tieng dan Sembungan. Terakhir adalah penguatan peran dan pengembangan kolaborasi parapihak dalam mendukung Program pemulihan Dieng. dalam hal ini TKPD sudah terbentuk dan memiliki

road map sebagai acuanya. Sedangkan dalam kolaborasi parapihak, hingga sekarang ini, beberapa SKPD belum memandang TKPD sebagai sebuah tim kerja/forum antar sektor dimana program-program yang bersangkutan-paut dengan Kawasan Dieng wajib diintegrasikan.

Selanjutnya akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai-nilai dan norma eksternal yang ada di masyarakat atau yang dimiliki oleh para *stakeholders*. Acuan pelayanan yang digunakan oleh organisasi publik juga dapat menunjukkan tingkat akuntabilitas pemberian pelayanan publik. Acuan pelayanan yang dianggap paling penting oleh suatu organisasi publik adalah dapat merefleksikan pola pelayanan yang dipergunakan yaitu pola pelayanan yang akuntabel yang mengacu pada kepuasan publik sebagai penerima layanan (Agus Dwiyanto, 2006 : 57). Dengan demikian, akuntabilitas TKPD dalam Pelaksanaan PPD merupakan bentuk pertanggungjawaban TKPD atas penyelenggara PPD kepada seluruh pihak yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung.

Setiap kinerja yang dilakukan oleh organisasi publik diperlukan adanya akuntabilitas atau pertanggungjawaban. Pihak yang menerima layanan membutuhkan pertanggungjawaban dari pemberi layanan. Dengan demikian, pemberi layanan tidak akan keluar dari karidor

kewenangannya. Karena secara tidak langsung ada pengawasan tidak langsung dari berbagai pihak.

Pertanggungjawaban atau akuntabilitas TKPD sangat berhubungan dengan aspek kepuasan masyarakat dalam menerima program. Pertanggungjawaban TKPD dalam melaksanakan program merupakan salah satu aspek yang mempengaruhi penilaian masyarakat atas pelaksanaan program. Akuntabilitas atau pertanggungjawaban TKPD dalam melaksanakan program kepada masyarakat sebagai sasaran penerima program belum maksimal. Hal ini dapat dilihat dari tingkat kepercayaan masyarakat terhadap program yang masuk ke Kawasan Dieng. disamping itu peneliti menemukan bahwa banyak dinas yang melaksanakan program yang berkaitan dengan Kawasan Dieng, tidak mengacu kepada *road map* penyelamatan Dieng. sedangkan kerjasama antar dinas juga belum terlaksana, sehingga program bersama yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada pada masyarakat Kawasan Dieng belum terpenuhi. Hal tersebut dikarenakan permasalahan di Dataran Tinggi Dieng merupakan permasalahan yang kompleks. Hal ini menyangkut tidak hanya masalah lingkungan hidup saja, namun juga masalah ekonomi, sosial dan budaya. Hal ini menjadikan TKPD harus berkolaborasi untuk melaksanakan program yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada pada masyarakat.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa masih adanya program-program dinas yang merupakan satu-kesatuan dari TKPD yang

belum sesuai dengan nilai-nilai yang ada pada masyarakat Kawasan Dieng, dan belum adanya kolaborasi antar dinas dalam menjalankan program terkait Kawasan Dieng menjadikan internal TKPD mengalami perpecahan, sehingga tidak dapat menjalankan PPD dengan lebih baik. Dengan melihat hal tersebut, maka TKPD dalam hal akuntabilitas belum maksimal dalam melaksanakan program yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada pada masyarakat Kawasan Dieng.